

PERTOBATAN EKOLOGIS MENURUT ENSIKLIK *LAUDATO SI* DALAM MENANGGAPI PERSOALAN KERUSAKAN HUTAN DI KABUPATEN SINTANG, KALIMANTAN BARAT

Vinsensius Rixnaldi Masut, Eugenius Ervan Sardono dan Dominikus Siong

STFT Widya Sasana Malang

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pertobatan ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si* dalam menanggapi persoalan kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Menurut Ensiklik *Laudato Si*, seluruh alam semesta merupakan ciptaan Allah yang bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Ensiklik ini menyebut alam semesta sebagai rumah bersama yang harus dipelihara demi terciptanya persekutuan universal dalam Allah. Persoalan ekologis seperti kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang merupakan pencederaan atas keutuhan rumah bersama dan persekutuan seluruh ciptaan. Maka melalui Ensiklik ini Gereja menyerukan pertobatan ekologis bagi seluruh manusia agar kembali merajut persekutuan dengan alam semesta. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan atas konsep pertobatan ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si*. Tema ini kemudian dielaborasi dengan berbagai macam persoalan ekologis zaman ini, secara khusus persoalan kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang. Temuan dari studi ini ialah: 1) Kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang bertentangan dengan pandangan Gereja dalam Ensiklik *Laudato Si* bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah dan rumah bersama yang harus dipelihara. 2) Manusia mesti melakukan pertobatan ekologis yang dimulai dari kesadaran bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang harus dipelihara sampai pada tindakan konkret komunal untuk menjaga keutuhan hutan di Kabupaten Sintang.

Kata kunci: Gereja, hutan, *Laudato Si*, persekutuan, pertobatan ekologis

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ekologis yang tidak bisa hidup dan berkembang menjadi manusia seutuhnya tanpa lingkungan alam karena manusia itu sendiri bergantung pada alam, seperti air, udara, tanah, hutan, laut, flora dan fauna. Oleh karena ketergantungan ini, maka manusia dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam. Kesadaran akan hubungan manusia dan alam ini dapat dilihat pada berbagai aspek kehidupan. *Pertama*, pada level biologis, manusia tidak bisa hidup tanpa air, udara dan makanan yang disediakan oleh alam. Tanpa tanah, air, dan udara manusia akan mati. Jadi, ada rangkaian jaring kehidupan yang terajut erat dalam ekosistem yang memungkinkan kehidupan, baik kehidupan

manusia maupun kehidupan pada umumnya. *Kedua*, pada level ekonomis, manusia bergantung seluruhnya kepada alam. Tidak ada ekonomi yang berkembang di luar alam dan tidak mengandalkan alam. *Ketiga*, pada level budaya, manusia tidak bisa hidup sebagai makhluk berbudaya tanpa alam karena budaya manusia juga dibentuk oleh lingkungan alam itu sendiri (Eugen Sardono, 2014). Maka panggilan manusia untuk merawat alam merupakan suatu tanggung jawab yang mutlak.

Namun pada kenyataannya, ambisi manusia modern untuk mengeruk kekayaan alam sudah sangat sulit untuk dibendung lagi. Mengatasnamakan manusia sebagai entitas tertinggi, alam pun disubordinasikan pada nomor yang kesekian. Di banyak tempat, lingkungan alam mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan karena

penebangan hutan secara ilegal, pencemaran air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara dari kendaraan dan pabrik, kebakaran hutan, perambahan suaka margasatwa, pembuangan sampah sembarangan, dan berbagai macam kerusakan lainnya (Meran, Markus, 2016: 17).

Dalam (Tempo, 13 Desember 2020, 29) dikatakan, di Indonesia, hal ini sungguh nyata dalam ratifikasi undang-undang yang mengaburkan prinsip pemeliharaan lingkungan hidup. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi indikasi kekeliruan arah yang dipilih pemerintah. Undang-undang sapu jagat alias *omnibus law* ini memudahkan konversi hutan untuk kepentingan industrialisasi. Pasal-pasal yang mengancam hutan itu jelas mengabaikan fakta bahwa deforestasi adalah penyumbang utama kerusakan bumi ini. Di sini pembangunan seolah-olah berdiri tepat di persimpangan jalan antara dua kutub yang saling kontra. Di satu sisi, manusia membicarakan progres kemajuan “pembangunan”, tapi di sisi lain pembangunan juga meninggalkan bekas dan jejak destruksi ekologis yang berdampak pada ketahanan hidup masyarakat (Ranboki, Buce A, 2017). Dalam (*Kompas*, Rabu 27 November 2019, 15) diberitakan pada tahun 2019 misalnya menjadi tahun terparah kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Kebakaran hutan, penambangan liar, dan banjir terjadi di banyak tempat di wilayah Indonesia.

Saat ini dunia memang sedang berjuang mengatasi masalah perubahan iklim yang terus mengalami penurunan akibat masifnya praktik industrialisasi yang mengaburkan prinsip lingkungan hidup.

Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul: *21 Lessons 21 Adab untuk Abad ke-21* menyebutkan keruntuhan ekologi sebagai salah satu persoalan utama dunia saat ini, khususnya prospek perubahan iklim (Yuval Noah Harari, 2018,132). Jika seluruh dunia tetap tidak mengurangi emisi gas rumah kaca dalam dua puluh tahun ke depan, suhu global rata-rata akan meningkat lebih dari dua derajat Celcius yang mengakibatkan meluasnya padang pasir, hilangnya lapisan es, meningkatnya air pasang, cuaca ekstrem yang pada gilirannya mengganggu produksi pertanian dan mengganggu kesehatan. Namun dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Roma, banyak negara yang tidak mau terlibat aktif dalam membangun komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti China, Rusia, dan Arab Saudi yang menargetkan dekarbonisasi pada 2060; suatu tanda ketidakseriusan di tengah situasi kemendesakan saat ini (*Kompas*, 2 November 2021).

Selain itu, upaya menyelamatkan bumi kembali didengungkan setelah Pandemi Covid-19 merusak tatanan dunia. Berdasarkan hasil penelitian di laboratorium, pandemi ini rupanya dipicu oleh virus SARS-CoV-2 yang berasal dari kelelawar hutan. Penggundulan hutan rupanya memperbesar peluang interaksi manusia dengan hewan liar sehingga memungkinkan bagi virus zonasi seperti SARS-CoV-2 melompat lintas spesies dan berbagai kuman kepada manusia. Fakta ini membuktikan bahwa kerakusan manusia modern untuk mengeksploitasi alam dengan semena-mena bisa menjadi pedang makan tuan. Praktik kapitalisme yang merambah hutan dan satwa liar secara masif dapat memberi kemungkinan akan penularan virus yang baru. Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengingatkan semua negara untuk mengatur ulang ekonominya dengan mempertimbangkan aksi-aksi proiklim. Tidak ada yang lebih penting dilakukan sekarang ini selain menangani krisis iklim seiring dengan mengatasi Pandemi Covid-19. Indonesia dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga dunia bisa menjadi aktor utama mewujudkan visi proiklim ini. Dengan meratifikasi perjanjian Paris pada 2016 silam, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara swadaya hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030 (Momentum Ekonomi Hijau. Tempo, 13 Desember 2020, 29).

Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis memberi perhatian khusus pada persoalan kerusakan hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, akibat pertambangan dan pembabatan hutan secara ilegal. Aktivitas masif manusia yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup telah memperparah kondisi hutan. Akibatnya, masyarakat Kabupaten Sintang mengalami persoalan kekurangan air bersih, banjir, hilangnya flora dan fauna, serta ketidaksurutan tanah. Pemalakan liar atas hutan ini merupakan tindakan deforestasi yang merusak ekologi. Alam yang sejatinya menjadi “ibu pertiwi” yang harus dilindungi justru direduksi menjadi alat instrumen bagi kepentingan sepihak manusia. Mengutip Leonardo Boff, bumi ini ibarat “perempuan” yang menderita karena telah diperkosa oleh “laki-laki” sehingga kehilangan kecantikan dan pesonanya (Eugen Sardono, 2014).

Gereja Katolik sebagai bagian dari dunia merespon persoalan krisis ekologi ini dengan mengeluarkan *Ensiklik Laudato Si* pada tahun 2015. Ensiklik ini berbicara banyak tentang persoalan-persoalan kontekstual di dunia saat ini, seperti polusi dan perubahan iklim, masalah air dan limbah industri, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, penurunan kualitas hidup manusia dan kemerosotan sosial, ketimpangan global, dan berbagai macam persoalan konkret lainnya. Namun sebagaimana yang dijelaskan dalam nomor awal ensiklik ini, *Ensiklik Laudato Si* memberi perhatian banyak pada persoalan yang terjadi pada tanah, air, udara dan semua bentuk kehidupan yang ada di atas bumi, termasuk kaum miskin yang paling sering diabaikan dan dilecehkan (LS 2).

Oleh karena itu, melalui ensiklik ini Gereja menyerukan suatu pertobatan ekologis komunal. Pertobatan ini ditandai dengan rasa syukur kepada Allah atas kebaikan-Nya melalui alam ciptaan, kesadaran penuh kasih bahwa manusia dalam seluruh ciptaan tergabung dalam suatu persekutuan universal serta mengembangkan antusiasme dan kreativitas dalam menghadapi masalah dunia dengan bertanggung jawab (LS 221). Dengan demikian manusia dapat membangun persaudaraan penuh kasih dengan seluruh ciptaan. Di sini problem ekologis dan kemiskinan dunia telah terkulminasi dalam *Ensiklik Laudato Si* ini (Ranboki, Buce A, 2017).

Ensiklik Laudato Si: On Care for Our Common Home merupakan ensiklik kedua yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus setelah *Ensiklik Lumen Fidei* (Terang Iman) yang dikeluarkan pada tahun

2013. Ensiklik ini tertanggal 24 Mei 2015 tapi baru dipublikasikan secara resmi pada 18 Juni 2015. Kata *Laudato Si* merupakan kata bahasa Italia yang diambil dari sebuah nyanyian Santo Fransiskus dari Asisi, *Laudato Si, mi' Signore* yang berarti Terpujilah Engkau, Tuhanku. Melalui syair pujian Fransiskus Assisi kepada segala makhluk ciptaan di bumi ini, Paus Fransiskus menyadarkan semua orang pada zaman ini bahwa bumi adalah rumah kita bersama (Meran, Markus, 2017: 42-67).

Istilah “bumi adalah rumah kita bersama” tampaknya menjadi salah satu istilah penting dalam ensiklik ini. Refleksi Paus Fransiskus ini berangkat dari tendensi manusia yang tidak lagi memanfaatkan alam dengan bijak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fakta yang mengancam kelangsungan hidup manusia sebagaimana yang telah disebutkan dalam ensiklik ini, seperti polusi, meningkatnya volume limbah dan sampah, perubahan iklim, pemanasan global, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, hujan asam, kekeringan sumber mata air, kehilangan biodiversitas dan masih banyak fenomena lain, termasuk masalah kemiskinan (Ranboki, Buce A, 2017). Maka istilah bumi adalah rumah kita bersama merupakan ajakan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antargolongan manapun untuk secara bersama menata kembali model hidup di atas bumi ini. Pada titik ini, Ensiklik *Laudato Si* juga hendak mengkritik teori “ekologi konvensional” yang hanya serius pada problem lingkungan (*environmentalism*) tanpa melihat ketimpangan relasi di antara manusia dan alam. Artinya, manusia tidak mendapat perhatian serius dalam studi ekologi, seolah-olah manusia tidak ada sangkut

pautnya dengan alam. (Ranboki, Buce A, 2017). Oleh karena itu, Paus Fransiskus melalui Ensiklik *Laudato Si* menyerukan suatu pertobatan ekologis bagi seluruh manusia dalam hubungannya dengan alam sebagai ciptaan Allah. Tindakan manusia yang merusak alam merupakan pencederaan atas karya Allah dan persekutuan universal seluruh alam semesta.

Tema pertobatan ekologis dalam Ensiklik *Laudato Si* boleh disebut sebagai obat penawar yang dianjurkan oleh Gereja dalam menanggapi persoalan ekologis yang terjadi atas bumi ini. Maka tidak heran jika tema ini ditempatkan pada bagian akhir bersama tema-tema lainnya dalam bingkai pendidikan dan spiritualitas ekologis yang menjadi judul besar bab terakhir dari ensiklik ini. Adapun tema pertobatan ekologis ini dijelaskan secara padat ke dalam enam nomor, mulai dari nomor 216 sampai 221. Tema ini memuat beberapa poin penting yang menjadi tawaran Gereja bagi seluruh umat manusia dalam membangun kembali relasi yang utuh dengan alam semesta.

Pertama, upaya manusia untuk memperbarui kemanusiaan (kepedulian terhadap sesama dan alam) mesti berangkat dari keyakinan iman yang terdapat dalam nilai-nilai Injil. Paus Fransiskus menawarkan kepada umat Kristiani suatu kerangka spiritualitas ekologis yang tidak terlepas dari spiritualitas Kristiani sehingga aksi pertobatan ekologis sungguh-sungguh dimaknai dalam terang iman. Hal ini penting karena dalam pemaknaan nilai-nilai Injil, umat Kristiani menyadari bahwa “kehidupan rohani tidak terpisah dari tubuh kita sendiri, atau dari alam, atau dari realitas dunia ini, tetapi justru dihayati bersamanya dan di dalamnya, dalam persekutuan

dengan semua yang mengelilingi kita” (LS 216). Artinya, dengan digerakkan oleh spiritualitas Kristiani, umat Kristiani mampu menangkap alasan terdalam aksi pertobatan ekologisnya.

Kedua, pertobatan ekologis pada dasarnya memang merupakan pertobatan batin yang mendalam. Tapi pertobatan batin tanpa aksi konkret yang nyata atau pasif merupakan suatu kesadaran iman yang tidak konsisten. Maka pertobatan ekologis juga berarti terlibat aktif dalam membangun hubungan yang solid dengan dunia sekitar sebagai buah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Menurut Paus Fransiskus, menghayati panggilan untuk melindungi karya Allah adalah bagian penting dari kehidupan yang saleh, dan bukan sesuatu yang opsional atau aspek sekunder dalam pengalaman kristiani (LS 217).

Ketiga, hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan merupakan salah satu dimensi pertobatan manusia yang utuh (LS 218). Hal ini ditandai dengan sikap kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan berani membangun komitmen untuk bertobat dengan sepenuh hati. Pertobatan hati dan sikap hidup sangat penting untuk mencapai rekonsiliasi dengan seluruh alam semesta.

Keempat, sebagai suatu masalah sosial yang begitu kompleks, persoalan ekologis tidak cukup hanya menjadi pertobatan individu, tapi harus diatasi oleh jaringan masyarakat luas. Menurut Paus Fransiskus, individu sendirian dapat kehilangan kemampuan dan juga kebebasan mereka untuk mengatasi pola pikir utilitarian yang dididik secara individualis sehingga dibutuhkan suatu kekuatan bersama (LS 219). Maka pertobatan ekologis bukan hanya menjadi pertobatan individual, tapi juga pertobatan komunal.

Kelima, pertobatan ekologis menyiratkan berbagai sikap yang bersama-sama menumbuhkan semangat perlindungan yang murah hati dan penuh kelembutan (LS 220). (1) Manusia mesti bersyukur kepada kasih Allah yang telah menganugerahkan dunia untuk didiami dan digunakan. (2) Kesadaran ini menghantar manusia pada refleksi bahwa manusia berada dalam persekutuan universal yang indah bersama ciptaan Allah yang lainnya. (3) Pertobatan ekologis mendorong umat beriman untuk mengembangkan antusiasme dan kreativitasnya dalam menghadapi masalah dunia dan mempersembahkan diri kepada Allah. dengan demikian, seluruh anugerah Allah kepada manusia hendaknya membawa manusia pada sikap tanggung jawab besar atas keutuhan alam sebagai buah yang lahir dari perjumpaan dengan Allah.

Keenam, pertobatan ekologis mesti berjalan bersama dengan keyakinan iman sehingga semakin memperkaya makna pertobatan. Dalam iman Kristiani, telah direfleksikan bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia atau keyakinan bahwa Yesus yang bangkit hadir dalam setiap makhluk, serta kesadaran bahwa Allah telah menciptakan dunia dalam tata tertib menurut tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semuanya ini menunjukkan bahwa dimensi pertobatan manusia tidak hanya berada dalam tataran batiniyah, tapi juga mesti terhubung dengan dunia sekitar dalam persaudaraan bersama seluruh ciptaan Allah.

Seruan Paus Fransiskus ini mengajak semua orang agar menata kembali dunia yang telah dirusakkannya. Bahwa orang tidak dapat membangun masa depan hanya

dengan memikirkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan krisis lingkungan dan penderitaan orang-orang yang miskin. Ajakan Paus Fransiskus ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen, tetapi juga kepada semua orang yang mendiami bumi ini. Pertobatan komunal dalam masyarakat global bisa mengubah dunia ini menjadi rumah bersama yang layak dihuni.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan atas konsep pertobatan ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si*. Penulis melakukan pembacaan kritis atas ensiklik ini dan berita tentang persoalan ekologis, khususnya kerusakan hutan di Kabupaten Sintang dalam buku, jurnal, koran dan majalah, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum, penulis menggunakan dua sumber data untuk menjelaskan seluruh isi tulisan ini, yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data pertama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama untuk menghasilkan informasi yang akurat (Titin Pramiyati, 2017: 679-686). Dalam tulisan ini Ensiklik *Laudato Si* menjadi data primer dalam memahami seruan Gereja tentang pertobatan ekologis seluruh umat manusia. Adapun data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak lain atau sumber tidak langsung (Mudrajad Kuncoro, 2009). Dalam tulisan ini, yang menjadi data sekunder adalah berita tentang kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang yang dimuat dalam koran, majalah, jurnal, dan berita internet.

Tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian utama. *Pertama*, diuraikan latar belakang penulisan untuk menunjukkan kemendesakan dan kebaruan studi ini. *Kedua*, menjelaskan metodologi penelitian yang menjadi kerangka kerja untuk menjelaskan seluruh isi tulisan. *Ketiga*, menampilkan hasil dan pembahasan tulisan ini, yakni menguraikan pertobatan ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si*, fenomena kerusakan hutan di Kabupaten Sintang, serta tanggapan Gereja atas kerusakan hutan tersebut dengan pisau bedah pertobatan ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si*. Keempat, memuat kesimpulan penulis atas seluruh pembahasan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kerusakan Hutan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bernilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan nonkayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan hayati, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kebudayaan (Saharjo, 2020). Hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Kabupaten Sintang itu sendiri memiliki 1,3% hutan dari total wilayah hutan Indonesia, termasuk biodiversitas yang terdapat di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Kawasan hutan (lindung dan produksi) mencakup 59% dari luas Kabupaten Sintang. Fakta ini menunjukkan betapa hutan di Kabupaten Sintang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat

di sana. Hal ini tampak dalam perekonomian Kabupaten Sintang yang didominasi oleh sektor berbasis sumber daya alam dan lahan, terutama pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha membangun komitmen untuk menjadikan Kabupaten Sintang sebagai kabupaten lestari yang diperkuat melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) & Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari (RAD-SL)

(https://earthinnovation.org/wpcontent/uploads/2018/09/profiles_led/SJS_Profiles_Other/Profile_SINTANG_Sukri_2020_IND.pdf.)

Namun beriringan dengan komitmen tersebut, fenomena kerusakan hutan di Kabupaten Sintang juga sering terjadi. Menurut Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, deforestasi di Kalimantan Barat telah terjadi sejak tahun 2001 dan kembali marak sejak periode 2011 sampai 2015. Penyebab paling utama deforestasi di Kalimantan Barat memang tidak lain adalah pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Pemberian izin untuk aktivitas bisnis itu sudah berlangsung puluhan tahun, sejak rezim Orde Baru hingga rezim Jokowi. Pada periode 2001 sampai 2019, deforestasi di Kalbar sudah mencapai sekitar 1,187 juta hektare (ha). Adapun pada 2019-2020, penggundulan hutan di Kalbar mencapai 16,38 ribu ha. Data ini adalah angka tertinggi jika dibandingkan dengan seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Secara umum kerusakan hutan di Kabupaten Sintang diakibatkan oleh operasi perusahaan kelapa sawit, karet, dan pertambangan. Mengatasnamakan kesejahteraan bersama di bawah bendera

pembangunan nasional, pemerintah memberikan banyak kelonggaran bagi para investor untuk mengeksploitasi hutan. Banyak yang menilai jika pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem demi tujuan pembangunan tersebut. Selain aktivitas industri, kawasan hutan di Kalimantan Barat juga sering dirusak oleh masyarakat setempat. Kasus yang sering terjadi ialah penebangan pohon secara ilegal dengan alasan untuk bertahan hidup. Dinas Kehutanan Kalbar mencatat, terdapat 406 kasus pembalakan liar di Kalbar dalam kurun waktu 2005-2007. Selain itu, kegiatan penambangan emas ilegal di pinggir-pinggir sungai di Kalbar juga cukup memprihatinkan. Data Dinas Pertambangan Kalbar tahun 2005 mencatat ada 1.480 peti yang melibatkan sekitar 10.093 penambang. Keberadaan peti ini juga banyak memakai bahan kimia merkuri yang berpotensi mencemari sungai (<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2008/09/20/07201186/~Regional~Kalimantan?amp=1&page=3>).

Aktivitas perusakan hutan yang masif dilakukan tersebut telah membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat. Persoalan terbaru yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sintang adalah bencana banjir yang terjadi sejak 21 Oktober 2021 yang lalu. Banjir ini telah merendam pemukiman warga di 12 kecamatan dan merusak banyak fasilitas umum karena tinggi permukaan air mencapai 300-400 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya mengakibatkan rusaknya daerah tangkapan hujan sebagai akibat dari deforestasi dan kerusakan hutan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten

Sintang, jumlah warga terdampak bencana banjir mencapai 35.807 KK atau 124.497 jiwa, sedangkan yang mengungsi sebanyak 7.545 KK atau 25.884 jiwa. Bencana banjir ini juga menyebabkan 77 gardu PLN mengalami gangguan (<https://www.republika.co.id/berita/r201a1328/jempol-greenpeace-untuk-pengakuan-deforestasi-sintang-jokowi>).

Berdasarkan data di atas, poin yang hendak ditegaskan ialah fenomena deforestasi akibat tindakan destruktif manusia membawa dampak buruk bagi keutuhan ekologis, maupun bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan atas hutan telah mengakibatkan hilangnya flora dan fauna yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Bagi manusia, kerusakan hutan mengakibatkan timbulnya bencana banjir pada musim hujan karena banyak hutan yang sudah gundul sehingga tidak memungkinkan untuk meresap air hujan dan mencegah terjadinya banjir. Fenomena kerusakan hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Sintang merupakan gambaran partikular bumi yang merupakan rumah kita bersama akhirnya lebih dikenal sebagai tempat pembuangan sampah atau rumah yang sedang rubuh (Lelboy, Viktoria, 2017: 73-88).

Kerusakan Hutan di Kabupaten Sintang dalam Kacamata Pertobatan Ekologis menurut Ensiklik *Laudato Si* Pertobatan Ekologis dan Konsep Antroposentrisme

Masalah kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sebenarnya merupakan masalah degradasi moral manusia. Dikatakan demikian karena masalah kerusakan hutan seperti yang terjadi di Sintang selalu dimulai dari pihak manusia. Dalam kasus ini, manusia menempatkan

diri sebagai yang tertinggi di atas hutan. Bagi manusia hutan tidak lebih dari alat untuk memenuhi kepentingannya atau objek kerakusannya. Hal itu nyata melalui cara pandang yang antroposentris dengan menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan. Ia seolah-olah menjadi tuan atas alam semesta yang dapat bertindak apa saja. Dampak langsung dari cara pandang seperti ini adalah munculnya masalah kerusakan hutan seperti yang terjadi di Sintang. Semua masalah ini berpangkal dari cara pandang antroposentrisme.

Menurut Sony Keraf dalam bukunya yang berjudul *Etika Lingkungan*, konsep antroposentris membawa dua cara pandang yang merugikan alam, yaitu: *Pertama*, antroposentris dilihat sebagai sebuah teori filsafat yang menyatakan bahwa nilai dan prinsip moral tertinggi hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Menurut teori ini, etika hanya berlaku bagi manusia. Maka segala macam tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan dan tidak pada tempatnya.

Kedua, antroposentris sangat bersifat instrumentalistik dalam pola hubungan manusia dengan alam. Menurut teori ini, alam hanya dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia. Kalau pun manusia mempunyai sikap peduli terhadap alam, itu semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan hidup manusia, bukan karena pertimbangan bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga pantas untuk dilindungi. Sebaliknya jika alam itu sendiri tidak berguna bagi kepentingan manusia maka

secara otomatis alam akan diabaikan begitu saja (Sonny Keraf, 200), 34)

Hemat penulis, konsep antroposentris inilah yang mendasari tindakan manusia dalam mengeksploitasi hutan Indonesia. Masalah kebakaran hutan dan penambangan yang tidak memperhatikan prinsip lingkungan hidup adalah bukti nyata antroposentris ini. Hutan hanya dilihat sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ibu yang telah memberikan segalanya bagi kehidupan manusia. Di sini eksistensi alam tidak lagi dihargai meskipun manusia telah mendapatkan oksigen, air, kayu, obat-obatan dan berbagai macam kebutuhan hidup lainnya. Semua hal itu berubah ketika manusia menyebut dirinya sebagai pusat di atas segalanya dan hutan tidak lebih dari alat yang mengabdikan kepentingan manusia. Maka tidak mengherankan jika pembakaran atas hutan yang berhektar-hektar atau pun masalah penambangan liar yang tidak memperhatikan prinsip lingkungan hidup bukan menjadi sebuah masalah yang sangat penting.

Ensiklik *Laudato Si* memberi tempat secara khusus bagi pembahasan antroposentrisme ini. Paus Fransiskus memberi judul besar *Akar Manusiawi Krisis Ekologis* untuk melihat secara lebih mendalam hubungan antara antroposentrisme modern dengan persoalan ekologis. Bermula dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, khususnya teknosains, manusia pun dibentuk oleh paradigma teknokratis. Menurut Paus Fransiskus, sekarang ini hidup manusia berangsur-angsur diserahkan kepada keadaan yang dikondisikan oleh teknologi, yang

dipandang sebagai kunci utama untuk memaknai eksistensi (LS 110). Antroposentrisme modern kemudian tampak dalam pola pikir teknis dalam memahami realitas, termasuk dalam memandang manusia dan dunia. Hal ini tampak dalam caranya mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keutuhannya. Armada Riyanto menggambarkan konsep antroposentris ini dengan sangat jelas.

Manusia hanya berpikir mengenai dirinya sendiri hari ini saat ini dan dalam perspektif sempit seperti yang dipikirkan sekarang ini. Manusia mengerahkan alat berat untuk mengeksplorasi apa saja yang tersembunyi di dalam Alam. Mula-mula membatasi hutan, lalu menggali tanah. Tetapi kemudian menggundulinya tanpa berpikir lebih jauh untuk memulihkannya. Menggali tanah, mengambil segala produk yang tersembunyi di dalamnya dan dengan begitu pencemaran luar biasa makin mencekik keseharian hidup manusia. (Armada Riyanto, 2013).

Persoalan kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang merupakan dampak dari pola pikir antroposentrisme ini. Manusia hanya memperhatikan kepentingan dirinya, seperti keuntungan ekonomi melalui aktivitas pertambangan, penebangan kayu, atau pun penanaman tanaman pabrik yang menyingkirkan tanaman asli dan yang merusak lingkungan sekitar. Pada dasarnya penyebab kerusakan hutan di Indonesia memang hampir 99% karena ulah manusia baik disengaja maupun tidak disengaja (unsur kelalaian), seperti kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, perladangan berpindah 25%, pertanian 17%, proyek transmigrasi 8% dan hanya 1% yang disebabkan oleh alam (Pasaribu, Sahat M., and Supena Friyatno, 2008). Di sini hutan kemudian

hanya menjadi instrumen pelengkap untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menurut Ensiklik *Laudato Si* ini, konsep antroposentrisme modern ini rupanya tidak hanya berdampak pada pola pikir teknokratis atas alam, tapi juga dalam memahami sesama. Manusia tidak dapat diharapkan melibatkan diri penuh hormat ke dalam dunia, jika pada saat yang sama tidak ada pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuannya yang unik berupa pengetahuan, kehendak, kebebasan, dan tanggung jawab (LS 118). Lebih lanjut ensiklik ini menjelaskan apabila orang tidak secara nyata mengakui nilai orang miskin, embrio manusia, atau orang yang cacat, akan sulit untuk mendengarkan jeritan alam sendiri. Hal ini menggambarkan betapa antroposentrisme manusia modern membawa dampak yang sangat kompleks dalam memaknai kehidupan.

Banyak orang menafsirkan secara salah pesan Tuhan dalam Kitab Kejadian yang memberikan kepada manusia kekuasaan atas alam. Manusia memandang dirinya sebagai tuan yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang lain. Akibatnya terciptalah ketimpangan hubungan dalam relasi manusia dengan sesama maupun dengan dunia. Padahal antroposentrisme kristiani memaksudkan manusia sebagai “tuan” yang bertanggung jawab atas dunia (LS 116). Kodrat manusia sebagai “Imago Dei” sejatinya memungkinkan manusia untuk turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dunia. Konkretnya ditunjukkan dengan berpartisipasi aktif dalam memelihara keutuhan alam, termasuk dengan kembali memelihara hutan di Kabupaten Sintang yang mengalami deforestasi. Logikanya, jika segala sesuatu diciptakan Allah, maka hanya Allah saja Pencipta bukan manusia.

Hanya Allah yang berkuasa atas ciptaan, juga berkuasa atas manusia. Penafsiran yang menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris), tidak selaras dengan tradisi biblis. Maka visi Kristiani tentang lingkungan hidup berciri teosentris, bukan antroposentris. Allah adalah pusat dan inti segala sesuatu, karena Dialah sumber dan asal segala sesuatu (Aman, Peter C, 2016: 188-208).

Dengan demikian, pertobatan ekologis juga berarti merubah pola pikir antroposentrisme yang keliru dalam memahami hubungan manusia dengan dunia. Status manusia sebagai *Imago Dei* mengacu pada kesadaran sebagai rekan kerja Allah di dunia dalam memelihara seluruh ciptaan.

Prinsip Biosentrisme dan Persekutuan Universal

Jika melihat konsep antroposentrisme di atas, memang dapat digambarkan dengan sangat jelas bagaimana manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal atas alam semesta, khususnya hutan di Kabupaten Sintang. Manusia menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupan sehingga segala macam nilai moral kehidupan hanya diberlakukan padanya, sedangkan hutan tidak lebih dari instrumen pelengkap semata. Maka tidak mengherankan bila terjadilah persoalan kerusakan hutan akibat tindakan destruktif manusia seperti kasus yang terjadi di Sintang. Padahal manusia hanyalah ciptaan Allah yang dipercayakan untuk merawat ciptaan yang lain.

Manusia telah dikaruniai akal budi dan hati nurani. Manusia mempunyai nalar dan rasio untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang benar dan salahnya. Ia pun mempunyai pengetahuan untuk

menghubungkan sebab akibat dari tindakannya. Hal ini pun didukung dengan ketajaman hati nurani yang dimilikinya. Ia mampu melihat nilai-nilai etis dan moral di balik tindakannya; memilah dengan tepat baik dan buruk sebuah tindakan. Maka sampai pada titik ini seharusnya masalah kerusakan hutan akibat ulah manusia tidak pernah terjadi, apalagi hutan itu sendiri telah memenuhi banyak kebutuhan hidup manusia, seperti udara yang sehat, air yang bersih, tanah yang subur, makanan, obat-obatan, kayu, dan segala macam jenis kebutuhan lainnya. Alam menjadi unsur yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, pertobatan ekologis yang diserukan oleh Ensiklik *Laudato Si* merupakan sebuah panggilan untuk kembali merawat alam. Di sinilah ketajaman akal budi dan hati nurani manusia dibuktikan. Bahwa konsep antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan dan karenanya nilai-nilai moral dan etika hanya berlaku bagi manusia pada dasarnya adalah sesuatu yang salah. Meskipun alam tidak mempunyai harkat dan martabat seperti manusia yang berakal budi dan berhati nurani, alam patut dihormati dan dijaga kehidupannya. Alam mempunyai nilai luhur sebagai ciptaan Allah yang tanpanya manusia tidak mampu menjalankan kehidupannya. Dalam iman Kristiani, telah direfleksikan bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah untuk disampaikan kepada manusia atau keyakinan bahwa Yesus yang bangkit hadir dalam setiap makhluk, serta kesadaran bahwa Allah telah menciptakan dunia dalam tata tertib menurut tugas dan tanggung jawabnya masing-masing (LS 121). Alam yang indah adalah tanda

kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera (Meran, Markus. 2016: 17-17).

Pandangan Gereja ini serupa dengan konsep biosentrisme modern di mana setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri (Sony Keraf, 2002). Menurut Paul Taylor, biosentrisme didasarkan pada empat keyakinan berikut ini. *Pertama*, keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama dimana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama. *Kedua*, keyakinan bahwa spesies manusia, bersama dengan semua spesies lain, adalah bagian dari sistem yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup mana pun, serta peluangnya untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain. *Ketiga*, keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuannya sendiri. Artinya, setiap organisme adalah unik dalam mengejar kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri. *Keempat*, keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain.

Berdasarkan argumen di atas, maka sudah sangat jelas bagaimana posisi manusia di alam semesta ini. Manusia bukanlah satu-satunya spesies yang mempunyai nilai dan makna hidup. Manusia hanyalah satu dari sekian banyak spesies lain yang menggantungkan hidupnya dari alam. Keistimewaannya hanya terletak pada kemampuannya dalam berakal budi, berhati nurani, dan berkehendak bebas yang seharusnya membawa manusia pada sikap penghargaan

terhadap keberadaan spesies lain dan seluruh isi alam semesta ini. Maka sampai di sini persoalan kerusakan hutan seperti yang terjadi di Sintang merupakan suatu tindakan yang sangat keliru.

Ensiklik *Laudato Si* nomor 220 menguraikan secara khusus pertobatan ekologis dalam bingkai hubungan antara manusia sebagai ciptaan Allah yang luhur dengan alam sebagai ciptaan Allah yang mesti dipelihara oleh manusia. Paus Fransiskus menyebutkan beberapa poin penting yang menjadi corak dasar pertobatan ekologis. *Pertama*, menyiratkan rasa syukur dan kemurahan hati dengan mengakui bahwa dunia merupakan anugerah yang diterima dari kasih Bapa, yang ditanggapi dengan sikap pengingkaran diri dan kemurahan hati tanpa pamrih. *Kedua*, pertobatan ini juga menyiratkan kesadaran penuh kasih bahwa manusia tidak terpisahkan dari makhluk hidup lainnya, tapi tergabung dalam suatu persekutuan universal dengan seluruh jagat raya yang indah. *Ketiga*, pertobatan ekologis mendorong orang beriman untuk mengembangkan antusiasme dan kreativitasnya untuk menghadapi masalah dunia dengan mempersembahkan diri kepada Allah. Di sini manusia tidak menganggap keunggulannya sebagai alasan untuk memegahkan diri atau mendominasi secara tak bertanggung jawab, tetapi sebagai kemampuan berbeda yang pada gilirannya memikul tanggung jawab besar yang lahir dari iman (LS 220). Seluruh semangat pertobatan ini mesti direfleksikan sebagai buah iman dan menjadi bentuk partisipasi manusia dalam melanjutkan karya penyelamatan Kristus di dunia.

Persekutuan universal seluruh jagat raya sebagai ciptaan Allah juga mensintesisasikan sebuah persahabatan.

Prinsip ini menawarkan sebuah paradigma baru berkaitan dengan relasi manusia dengan alam. Jika dalam kasus kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang, alam dilihat sebagai instrumen pelengkap untuk kepentingan manusia, maka dalam persekutuan universal (yang seirama dengan prinsip biosentrisme) alam pada dirinya sendiri mempunyai nilai luhur yang harus dihormati oleh manusia. Alam semesta beserta segala isinya merupakan “anugerah yang diterima dari Bapa” (LS 220) dan “bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan memiliki pesan untuk disampaikan kepada kita” (LS 221) serta kepastian bahwa Kristus hadir dalam setiap makhluk (LS 221). Dengan demikian, alam tidak lagi dipandang sebagai objek untuk memenuhi kepentingan manusia semata-mata, melainkan berubah menjadi sahabat yang juga memiliki peranan dan nilai penting dalam hidup manusia.

Hal penting yang dapat ditarik dari persekutuan universal ini adalah relasi intersubjektif atau relasi subjek-subjek. Alasan mendasarnya ialah nilai luhur kehidupan yang melekat pada alam *in se* dan juga atas sumbangannya yang sangat signifikan bagi hidup manusia. Artinya baik manusia maupun alam mempunyai nilai penting sebagai ciptaan Allah dan menjadi tempat pewahyuan Allah di dunia. Hal ini mengandaikan adanya usaha manusia untuk kembali bersatu dengan alam sebagai bentuk penghormatan atas sumbangannya bagi kehidupan manusia. Armada Riyanto menyebut relasi ini sebagai relasi intersubjektif, yaitu relasi yang sepadan (Armada Riyanto, 2018: 225), yang ditandai dengan “persaudaraan mulia seluruh ciptaan seperti yang dihayati oleh

Fransiskus dari Assisi dengan begitu cemerlang” (LS 221).

Pertobatan Komunal

Berteologi tentang ekologi tanpa mendasarinya pada korelasi antarciptaan, terutama relasi manusia dengan ciptaan lainnya merupakan suatu hal yang mustahil karena manusia hidup dan berada dalam korelasi dengan ciptaan lainnya. Fakta ini merupakan titik tolak induktif bagi pemikir lingkungan hidup dan teolog untuk merefleksikan lingkungan manusiawi (*human ecology*), sebagai konteks dari refleksi iman akan lingkungan hidup (*eco-theology*) (Aman, Peter C, 2016). Manusia sebagai suatu entitas yang terhubung dengan seluruh alam semesta hendaknya melihat kembali model relasi yang mendiskreditkan alam atau lingkungan. Manusia mesti menata kembali cara berpikir dan bertindak untuk sampai pada kesadaran bahwa seluruh alam semesta sejatinya organisme yang saling terhubung dalam persekutuan universal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pertobatan komunal yang global.

Persoalan ekologis atas kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang merupakan contoh partikular dari persoalan ekologis yang kompleks di seluruh dunia. Paradigma antroposentrisme modern yang kini nyata dalam wujud teknokratis telah menjadi acuan bertindak manusia dewasa ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia pada kesombongan yang melabeli diri sebagai “allah” yang berkuasa. Menurut Paus Fransiskus, dampak dari pengakuan sempit ini ialah melemahnya nilai intrinsik dunia. Artinya jika manusia tidak lagi menemukan kembali tempatnya dengan benar, ia tidak memahami dirinya dengan baik dan

akhirnya menyangkal realitasnya sendiri (LS 115). Di sinilah kompleksitas konsep keliru akan antroposentrisme modern karena bukan hanya menyangkut alam, tetapi juga sesama manusia dan diri manusia itu sendiri. Maka pertobatan ekologis pada hakikatnya juga merupakan pertobatan integral yang komunal.

Menurut Paus Fransiskus, sebagai suatu masalah sosial yang begitu kompleks, persoalan ekologis tidak cukup hanya menjadi pertobatan individu, tapi harus diatasi oleh jaringan masyarakat luas. Kerusakan hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Sintang merupakan suatu aktivitas destruktif jangka panjang oleh sekelompok pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Di dalamnya termasuk sistem pemerintahan korup yang meratifikasi surat izin operasi meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian dan keutuhan alam sehingga lebih sering menjadi penonton atau bahkan menjadi pelaku kerusakan hutan.

Oleh karena itu, pertobatan ekologis harus menjadi pertobatan komunal, bukan individual. Hal ini penting untuk menciptakan suatu perubahan yang berkelanjutan dan konsisten sebagai program bersama. Maka semua pihak, seperti pemerintah, Gereja, masyarakat, dan semua pihak lainnya harus turut berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan alam. Sebagai sebuah lembaga institusional yang berperan mengatur seluruh dinamika kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam mewujudkan pertobatan ekologis. Langkah konkret yang dapat ditempuh pemerintah ialah dengan kembali menegakkan undang-undang tentang pelestarian lingkungan

hidup dan menjalankan fungsi kontrolnya atas pemanfaatan hutan oleh para investor atau masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan ekonomi hijau sebagai tanggapan atas isu pemanasan global dan persoalan ekologis berupa kerusakan hutan selama satu dekade terakhir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, memastikan bahwa meski fokus pada pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, pemerintah tetap berkomitmen merealisasikan pembangunan berkelanjutan dan program yang ramah lingkungan. Target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, misalnya, pemerintah mencanangkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris. Bahkan untuk tujuan itu, Bappenas juga mengawinkan konsep ekonomi hijau dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dalam (*Tempo*, 13 Desember 2020, 91).

Selain itu, agar menjadi sebuah pertobatan komunal yang integral, pemerintah dapat membangun kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat, lembaga keagamaan, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan semua pihak lainnya. Gereja Katolik misalnya, Sejak Sidang Agung Gereja Katolik (SAGKI) tahun 2005, Gereja Indonesia telah merumuskan keprihatinannya terhadap persoalan kerusakan alam dan terus berpartisipasi dalam misi pertobatan ekologis praktis melalui pemeliharaan lingkungan hidup (Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006) Konsistensi pemerintah dalam melaksanakan programnya menjadi tanda keseriusan dalam mewujudkan pertobatan ekologis.

Misalnya tindakan penetapan kawasan konservasi dan kegiatan reboisasi yang berkelanjutan. Di kabupaten Sintang hal tersebut telah dimulai dengan Kawasan Taman Wisata Alam Baning di Kecamatan Sintang yang diperuntukkan untuk kawasan konservasi yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pendidikan dan penelitian serta wisata (Sudaryanti, Yunus, Abdurrani Muin, and Togar Fernando Manurung, 2014).

KESIMPULAN

Persoalan ekologi seperti kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat merupakan tanda pencederaan manusia atas lingkungan hidup. Alam yang sejatinya menjadi ibu yang memberikan kehidupan atau sebagai rumah yang menjadi tempat tinggal bersama kini berada di ambang kehancuran. Mengatasnamakan tujuan pembangunan nasional atau pemenuhan kebutuhan hidup, hutan pun dijarah tanpa bertanggung jawab. Hal ini diperparah oleh konsep antroposentrisme modern yang menjadikan manusia sebagai pusat kehidupan sehingga alam hanya dilihat sebagai instrumen pelengkap hidup manusia. Hal tersebut telah terbukti dalam persoalan kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang sebagai contoh partikular dari persoalan kerusakan hutan lainnya di Indonesia dan dunia.

Menanggapi berbagai macam persoalan ekologis ini, Gereja melalui Ensiklik *Laudato Si* menyerukan pertobatan ekologis. Pertobatan ini dimulai dari keyakinan iman untuk terlibat dalam misi penyelamatan dunia yang diwujudkan dalam aksi konkret melalui hubungan yang solid dengan dunia sekitar. Maka manusia perlu rendah hati untuk mengakui kesalahan

dan berani membangun komitmen untuk kembali memelihara alam dengan sepenuh hati. Hal tersebut dilanjutkan dalam aksi nyata melalui pertobatan komunal di mana semua pihak turut mengambil bagian dalam memelihara dan menjaga keutuhan alam. Semua bentuk kesadaran ini mesti dilihat dalam kacamata iman bahwa Allah telah menganugerahkan dunia ini kepada manusia untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Nya.

Oleh karena itu, prinsip antroposentrisme modern bertentangan dengan seruan pertobatan ekologis Ensiklik *Laudato Si* ini. Kodrat manusia sebagai "Imago Dei" sejatinya memungkinkan manusia untuk turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dunia, bukan menguasai dunia dengan tidak bertanggung jawab. Penciptaan alam oleh Allah juga menunjukkan bahwa alam *in se* bernilai dalam dirinya sebagai ciptaan Allah dan menjadi penunjang hidup manusia. Maka relasi yang terjadi sejatinya adalah relasi persaudaraan mulia seluruh ciptaan dalam suatu persekutuan universal. Krisis ekologis seperti yang terjadi di hutan Kabupaten Sintang merupakan pencederaan oleh manusia atas persekutuan tersebut. Dengan demikian, pertobatan ekologis yang komunal dan integral menjadi suatu keniscayaan.

Daftar Pustaka

A. Ranboki, Buce. (2017). "Menemukan Teologi Leonardo Boff dalam Ensiklik Paus Fransiskus *Laudato Si*." *Indonesian Journal of Theology* 5 (1).

Berdasarkan data yang dibagikan oleh Earth Innovation Institute.
https://earthinnovation.org/wp-content/uploads/2018/09/profiles_led/SJ

[S_Profiles_Other/Profile_SINTAN_G_Sukri_2020_IND.pdf](#).

Dokumentasi dan Penerangan KWI, Bangkit dan Bergeraklah! Dokumentasi Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005(Jakarta: Sekretariat SAGKI 2005, 2006), hal. 61-76.

Harari, Yuval Noah. (2018). *21 Lessons 21 Adab untuk Abad ke-21* (Manado: Global Indo Kreatif,).

<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2008/09/20/07201186/~Regional~Kalimantan?amp=1&page=3>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/22/15475461/greenpeace-sebut-banjir-sintang-karena-deforestasi-kalbar-sudah-kehilangan?page=all>.

<https://www.republika.co.id/berita/r201a1328/jempol-greenpeace-untuk-pengakuan-deforestasi-sintang-jokowi>.

<https://www.republika.co.id/berita/r201a1328/jempol-greenpeace-untuk-pengakuan-deforestasi-sintang-jokowi>.

Jayanta, Titin Pramiyati and Yulnelly. (2017). "Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer* 8, no. 2: 679-686.

Keraf, Sonny. (2002), *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kompas, 2 November 2021.

Kompas. 2019, Rabu 27 November

Kuncoro, Mudrajad. (2009) *Metode Penelitian Riset untuk Berbisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Lelboy, Viktoria. (2017). "MEMBANGUN KEPEDULIAN PASTORAL EKOLOGI." *JURNAL REINHA* 7, no. 2 73-88.

M., Pasaribu, Sahat and Supena Friyatno. "Memahami penyebab kebakaran hutan dan lahan serta upaya penanggulangannya: kasus di

- Provinsi Kalimantan Barat." *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8, no. 1 (2008): 44013.
- Meran, Markus. "Ensiklik *Laudato Si*." *Jurnal Masalah Pastoral* 4, no. 1 (2016): 17-17.
- Momentum Ekonomi Hijau. *Tempo*, 13 Desember 2020, 29.
- Peter C. Aman. (2016). "Teologi Ekologi dan Mistik-Kosmik St. Fransiskus Asisi." *Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 15, no. 2: 188-208.
- Riyanto, Armada. (2013) *Menjadi Mencintai, Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, Armada. (2018) *Relasioanalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saharjo, Bambang Hero, and Muhammad Yodhi Muhtady. (2020). "Potensi Kebakaran Hutan di IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Silvikultur Tropika* 11, no. 1: 38-43.
- Sardono, Eugen. (2014). <https://www.quareta.com/post/tanah-dan-status-0>
- Sudaryanti, Yunus, Abdurrani Muin, and Togar Fernando Manurung. (2014). "Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Tingkat Pohon pada Hutan Rawa Gambut di Taman Wisata Alam Baning Kabupaten Sintang." *Jurnal Hutan Lestari* 2, no. 1
- Viktori, Lelboy. (2017). "MEMBANGUN KEPEDULIAN PASTORAL EKOLOGI." *JURNAL REINHA* 7, no. 2: 73-88.